

## BAB V

### SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 dengan menggunakan rasio kemampuan daerah pembiayaan, rasio kemampuan mobilisasi daerah, rasio kemandirian terhadap bantuan, tingkat derajat otonomi fiskal, rasio efektivitas pengeluaran, rasio efektivitas penerimaan, rasio belanja rutin, rasio belanja pembangunan, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan pengeluaran, rasio pertumbuhan belanja rutin, rasio pertumbuhan belanja pembangunan, serta perbandingan masing-masing rasio antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pada rasio kemampuan daerah dalam pembiayaan pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya dari pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai belanja daerahnya.

2. Kinerja keuangan pada rasio kemampuan mobilisasi daerah sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 tidak terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta masih tergantung pada sumber dana eksternal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan kenaikan bantuan dari pemerintah pusat baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003.
3. Kinerja keuangan pada rasio kemandirian terhadap bantuan sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta masih tergantung pada sumber dana eksternal terutama dari pemerintah pusat/provinsi.
4. Kinerja keuangan pada tingkat derajat otonomi fiskal sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta belum mampu meningkatkan mobilisasi pembiayaannya melalui pendapatan asli daerahnya sehingga tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi semakin besar.
5. Kinerja keuangan pada rasio efektivitas pengeluaran sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 tidak terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan

bahwa kenaikan/penurunan realisasi pengeluaran pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta diikuti pula dengan kenaikan/penurunan target pengeluaran.

6. Kinerja keuangan pada rasio efektivitas penerimaan sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 tidak terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan realisasi penerimaan diikuti dengan kenaikan/penurunan target penerimaan .
7. Kinerja keuangan pada rasio belanja rutin pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan belanja rutin sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 lebih baik dibandingkan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003.
8. Kinerja keuangan pada rasio belanja pembangunan pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 tidak terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta masih mengalokasikan dananya untuk belanja rutin yang cukup besar, sehingga belanja pembangunan belum dapat ditingkatkan.
9. Kinerja keuangan pada rasio pertumbuhan PAD sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya



UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan masih menjadi sumber dana utama bagi pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta karena kenaikan pendapatan asli daerah diikuti dengan kenaikan bantuan pemerintah pusat/provinsi

10. Kinerja keuangan pada rasio pertumbuhan pendapatan sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta belum mampu meningkatkan penerimaan melalui pendapatan asli daerahnya sebagai sumber utama dana pemerintah daerah.
11. Kinerja keuangan pada rasio pertumbuhan pengeluaran sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta belum memberikan perhatian yang besar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
12. Kinerja keuangan pada rasio pertumbuhan belanja rutin sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana untuk belanja rutin sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 bertambah besar karena dana perimbangan dari pemerintah pusat juga meningkat.

13. Kinerja keuangan pada rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebelum diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 tidak terdapat perbedaan dengan sesudah diterbitkannya UU No.17 tahun 2003. Hal ini menunjukkan semakin besarnya dana yang dialokasikan untuk belanja rutin sehingga mengakibatkan belanja pembangunan tidak mengalami perubahan. Hal ini berarti pembangunan pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta belum menunjukkan orientasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek pembangunan daerah.
14. Pada perbandingan kinerja keuangan antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
  - a. Terdapat perbedaan rasio kemandirian pembiayaan antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, kecuali untuk Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten bantul dan Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dengan Gunung Kidul, Serta Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta tidak terdapat perbedaan.
  - b. Terdapat perbedaan rasio kemampuan mobilisasi daerah antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, kecuali untuk Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta tidak terdapat perbedaan.
  - c. Terdapat perbedaan rasio kemandirian terhadap bantuan antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, kecuali untuk Kabupaten Kulon

Progo dengan Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul serta Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul tidak terdapat perbedaan .

- d. Terdapat perbedaan tingkat derajat otonomi fiskal antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, kecuali untuk Kabupaten Kulon Pogo dengan Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul tidak terdapat perbedaan.
- e. Tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas pengeluaran antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, kecuali untuk Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta terdapat perbedaan.
- f. Rasio Efektivitas Penerimaan  
Tidak terdapat perbedaan pada rasio efektivitas penerimaan antar Kota dan Kabupaten di provinsi D.I Yogyakarta.
- g. Rasio Belanja Rutin  
Tidak terdapat perbedaan pada rasio belanja rutin antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta.
- h. Rasio Belanja Pembangunan  
Tidak terdapat perbedaan pada rasio belanja pembangunan antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta.
- i. Rasio Pertumbuhan PAD  
Tidak terdapat perbedaan pada rasio pertumbuhan PAD antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta.



j. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tidak terdapat perbedaan pada rasio pertumbuhan pendapatan antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta.

k. Rasio Pertumbuhan Pengeluaran

Tidak terdapat perbedaan pada rasio pertumbuhan pengeluaran antar Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta.

l. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Tidak terdapat perbedaan pada rasio pertumbuhan belanja rutin antar kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

m. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Tidak terdapat perbedaan pada rasio pertumbuhan belanja pembangunan antar kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

## **B. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Periode pengamatan data hanya 6 tahun sehingga mungkin dengan menambah periode pengamatan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
2. Sampel yang digunakan masih kurang, mungkin dengan menambah sampel seluruh kabupaten/kota/provinsi di Indonesia.

### C. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian misalnya rasio pajak, rasio efisiensi, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)PDRB dan rasio-rasio lainnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memperkuat penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian yaitu seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Andi Kristiawan. 2007. *Analisis Rasio Keuangan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Madiun Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Periode Pengamatan 1997-2005)*. Skripsi program strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Madiun (tidak dipublikasikan).
- Arya Sadjiarto. 2000. "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2. No.2. Nopember 2000 : 138-150*.
- Bambang Haryadi. 2002. "Analisis Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)". *Makalah Simposium Akuntansi V*. Ikatan Akuntansi Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik.
- Endri Agus Saputra. 2008. *Analisis Rasio Keuangan atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Periode Pengamatan 1996-2006)*. Skripsi program strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Madiun (tidak dipublikasikan).
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis – PP No. 24 Tahun 2005*. Yogyakarta : BPFE.
- Harry Waluya. 2001. "Analisis rasio PAD/APBD Terhadap Kebijakan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Agustus.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Johan Arifin. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiscal Stress (Studi terhadap beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol.6. No. 2.

- Khoirunisak dan Ardi Hamzah. 2007. "Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Sebelum dan Sesudah Undang-undang No.17 Tahun 2003 : Studi Kasus APBN 2000-2006". *Makalah Simposium Riset Ekonomi III ISIEI Surabaya*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mohammad Mahsun, Firma Sulistyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Mufidhatul Khasanah. 2007. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : Kasus APBD Kabupaten Sleman dan KulonProgo Tahun 2004 dan 2005 ". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. XVIII. No.1*.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta. BPFE
- Pusat Kajian Kebijakan. 2004. Reformasi Kebijakan Keuangan Negara. [www.pu.go.id/sekjen/puskabijak/warta/web\\_002/lin/reform.htm](http://www.pu.go.id/sekjen/puskabijak/warta/web_002/lin/reform.htm), diakses 07 Oktober 2008.
- Rahmat Tri Haryadi. 2005. "Analisa Rasio keuangan APBD sebagai Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Daerah". Artikel. *Media Akuntansi*. Tahun XII Edisi 45.
- Singgih Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah. 2007. "Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Pada APBN Tahun 2002-2006). *Makalah Simposium Riset Ekonomi III ISEI Surabaya*.
- Sohidin dan Ngadiman. 2005. "Analisa Rasio Keuangan APBD sebagai Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)". *Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol.2. No.2*.
- Sri Rustyaningsih. 2008. "Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. *Widya Warta No.2 Tahun XXXII*.
- Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali)". *Simposium Nasional Akuntansi VI*.



Tri Suprpto. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Skripsi program strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (tidak dipublikasikan).

Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Jawa dan Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X*.